

LITERATUR REVIEW : DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TATA KELOLA DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Wawan Erizona¹, Aldri Frinaldi², Lince Magriasti³, Hendra Naldi⁴

Program Studi S2 Ilmu Administrasi Negara (M.A.P)

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

e-mail: erizonawawan@yahoo.co.id

ABSTRACT

Fiscal decentralization is a major component of Indonesia's governance reform, intended to improve public service efficiency, strengthen accountability, and promote equitable development. This paper describes the relationship between fiscal decentralization, local government capacity, and accountability, as well as their implications for public service quality, poverty alleviation, and fiscal disparities. Using a descriptive literature-based approach, this study synthesizes empirical findings from national and international peer-reviewed research relevant to the Indonesian context. The findings reveal that fiscal decentralization can enhance public service delivery and regional development when accompanied by strong institutional capacity, robust accountability systems, and performance-based fiscal transfer mechanisms. Conversely, in regions with weak administrative capacity, decentralization tends to increase recurrent spending and potential corruption. Policy reforms in fiscal design and local governance are essential to ensure the effectiveness and equity of fiscal decentralization.

Keywords: Fiscal decentralization, local capacity, governance, accountability, fiscal equity

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan utama dalam reformasi pemerintahan Indonesia yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, dan mempercepat pemerataan pembangunan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hubungan antara desentralisasi fiskal dengan kapasitas pemerintahan daerah, akuntabilitas, serta implikasinya terhadap kualitas pelayanan publik, kemiskinan, dan ketimpangan fiskal. Penulisan ini menggunakan metode studi pustaka deskriptif berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian empiris nasional dan internasional yang relevan dengan konteks Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat pembangunan daerah apabila disertai dengan kapasitas kelembagaan yang baik, sistem akuntabilitas yang kuat, serta mekanisme transfer fiskal yang adil dan berbasis kinerja. Sebaliknya, pada daerah dengan kapasitas rendah, desentralisasi berpotensi meningkatkan belanja rutin dan membuka peluang terjadinya korupsi. Reformasi kebijakan fiskal dan tata kelola daerah menjadi kunci utama agar desentralisasi berjalan efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Desentralisasi fiskal, kapasitas daerah, tata kelola, akuntabilitas, pemerataan fiskal

A. Pendahuluan

Sejak akhir abad ke-20, desentralisasi menjadi salah satu pendekatan utama dalam reformasi tata kelola pemerintahan di berbagai negara. Konsep utamanya adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan memperdekat pemerintah pada masyarakat, mendorong inovasi kebijakan lokal, dan memperbaiki layanan publik (Smith, 1985; Rondinelli, 1999).

Indonesia mengadopsi desentralisasi secara menyeluruh melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan UU No. 23 Tahun 2014. Reformasi ini dikenal sebagai *Big Bang Decentralization* karena lingkup dan kecepatannya yang luas (Hofman & Kaiser, 2004). Selama lebih dari dua dekade, kebijakan tersebut menghasilkan sejumlah capaian, misalnya meningkatnya partisipasi masyarakat dan inovasi daerah, tetapi juga memunculkan persoalan berupa fragmentasi kebijakan, ketimpangan pembangunan, hingga potensi

penyalahgunaan wewenang (Smoke, 2015).

Desentralisasi fiskal di Indonesia telah menjadi tonggak penting dalam pergeseran paradigma pemerintahan dari sistem sentralistik menuju otonomi daerah. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola anggaran dan sumber daya lokal. Tujuannya adalah memperkuat efisiensi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. Namun, setelah lebih dari dua dekade pelaksanaannya, hasil yang dicapai masih menunjukkan variasi yang cukup besar antar wilayah.

Daerah dengan kapasitas administratif dan manajerial tinggi mampu memanfaatkan otonomi fiskal untuk memperbaiki infrastruktur, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, di daerah dengan kapasitas kelembagaan lemah, desentralisasi kerap memunculkan inefisiensi penggunaan

anggaran dan meningkatnya risiko korupsi. Dengan demikian, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas desentralisasi menjadi sangat penting dalam memperbaiki desain kebijakan fiskal nasional dan daerah.

B. Metode Penelitian (Huruf 12 dan Ditebalkan)

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh dari hasil penelitian empiris dan teoretis yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional, khususnya yang memiliki *Digital Object Identifier (DOI)* serta relevan dengan tema desentralisasi fiskal dan tata kelola daerah.

Analisis dilakukan secara tematik dengan tahapan: (1) menyeleksi artikel yang relevan, (2) mengekstraksi hasil penelitian dan temuan kunci, (3) mengelompokkan temuan berdasarkan tema seperti kapasitas kelembagaan, akuntabilitas fiskal, komposisi belanja, dan pemerataan fiskal, serta (4) melakukan interpretasi naratif untuk menyoroti hubungan antar konsep dan hasil empiris.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan (Huruf 12 dan Ditebalkan)

Hasil

Hasil penelusuran literatur menunjukkan variasi temuan. Sebagian besar menekankan aspek positif desentralisasi dalam memperbaiki layanan publik, namun tidak sedikit yang menyoroti dampak negatif berupa ketimpangan fiskal.

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Utama
1	Kis-Katos, K. & Sjahrir, B.S. (2017)	<i>The Impact of Fiscal and Political Decentralization on Local Public Investment in Indonesia</i>	Desentralisasi fiskal meningkatkan investasi publik di daerah berkapasitas tinggi, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Namun daerah dengan kapasitas administrasi lemah cenderung menggunakan dana untuk belanja rutin, menunjukkan pentingnya kapasitas kelembagaan lokal dalam efektivitas kebijakan.

2	Pal, S. & Wahhaj, Z. (2017)	<i>Fiscal Decentralization, Local Institutions and Public Goods Provision</i>	Menunjukkan bahwa institusi lokal berperan besar dalam efektivitas desentralisasi. Di komunitas dengan institusi informal kuat, dana publik digunakan untuk infrastruktur sosial, sedangkan di komunitas lemah terjadi penyalahgunaan dan ketimpangan layanan.	4	Setiawan, A.; Tjiptoherijanto, P.; Mahi, B.R.; Khoirunrofik, K. (2022)	<i>The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery</i>	Kapasitas teknis dan manajerial pemerintah daerah secara signifikan meningkatkan kualitas layanan publik. Daerah dengan kapasitas analitis rendah tidak mampu mengonversi otonomi fiskal menjadi peningkatan pelayanan.
3	Akita, T.; Riadi, A.A.; Rizal, A. (2021)	<i>Fiscal Disparities in Indonesia in the Decentralization Era</i>	Dana Alokasi Umum (DAU) membantu mengurangi kesenjangan fiskal, tetapi disparitas tetap tinggi karena PAD dan SDA sangat tidak merata. Reformasi formula DAU direkomendasikan agar berbasis kebutuhan dan kinerja daerah.	5	Alfada, A. (2019)	<i>Does Fiscal Decentralization Encourage Corruption in Local Governments?</i>	Desentralisasi meningkatkan peluang korupsi jika pengawasan dan akuntabilitas lemah. Provinsi dengan ketergantungan tinggi pada transfer pusat menunjukkan tingkat penyimpangan anggaran lebih besar.
				6	Changwoony, F.K. & Paterson, A.S. (2019)	<i>Accounting Practice, Fiscal Decentralization and Corruption</i>	Negara yang memiliki standar akuntansi publik kuat mengalami penurunan

			korupsi pasca-desentralisasi. Di negara berkembang, lemahnya sistem pelaporan menjadi pintu masuk praktik koruptif di tingkat daerah.				tanpa transparansi dan kebijakan redistributif, manfaat desentralisasi tidak dirasakan kelompok miskin.
7	Silitonga, M.S.; Wittek, R.; Snijders, T.A.B.; Heyse, L. (2023)	<i>Democratizing Corruption: A Role Structure Analysis of Indonesia's "Big-Bang" Decentralization</i>	Desentralisasi mengubah struktur korupsi di Indonesia: jaringan korupsi menjadi lebih kompleks, melibatkan lebih banyak aktor perantara. Korupsi tidak berkurang secara kuantitas tetapi berubah bentuk menjadi "kolaboratif" lintas lembaga.	9	Ghozali, I. & Khoirunrofik (2020)	<i>Fiscal Decentralization and Capital Expenditure Composition</i>	Desentralisasi meningkatkan proporsi belanja modal infrastruktur, tetapi menurunkan investasi pada pendidikan dan kesehatan. Diperlukan kebijakan seimbang antara fisik dan human capital.
8	Siburian, M.E. (2022)	<i>Fiscal Decentralization and Poverty: Evidence from Indonesia</i>	Desentralisasi fiskal menurunkan tingkat kemiskinan di daerah dengan kapasitas tata kelola tinggi. Namun,	10	Sahputri, R.A.M. & Siswidiyanto (2023)	<i>Decentralization and Human Development in Indonesia</i>	Indeks Pembangunan Manusia meningkat signifikan di daerah dengan kapasitas kelembagaan kuat dan perencanaan berbasis data. Daerah berkapasitas lemah tidak mengalami peningkatan signifikan meski menerima dana besar.

1 1	Yunan, Z.Y.; Freyens, B.; Vidyattama, Y.; Mohanty, I. (2023)	<i>Spread of Corruption in Indonesia After Decentralisation</i>	Korupsi daerah meningkat di awal desentralisasi namun kemudian menyebar secara spasial tidak merata. Korupsi lebih tinggi di daerah berpendapatan tinggi dengan banyak proyek publik.	McNab, R.M. (2018)	<i>e Composition</i>	(pendidikan & kesehatan) bila mekanisme monitoring nasional kuat. Tanpa pengawasan, belanja publik justru terkonsentrasi pada proyek jangka pendek.	
1 2	Lewis, B.D. (2023)	<i>Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law</i>	UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) memperbaiki koordinasi fiskal, tetapi menimbulkan risiko transisi karena perbedaan kesiapan kapasitas daerah. Diperlukan roadmap implementasi dan sistem pelaporan digital.	1 4	Letelier-Saavedra, L.E. (2015)	<i>Fiscal Decentralization in Specific Areas of Government</i>	Desentralisasi di sektor pendidikan dan kesehatan meningkatkan efisiensi jika disertai standar nasional layanan publik. Efek positif menurun bila pemerintah pusat lemah dalam koordinasi dan evaluasi.
1 3	Arze del Prado, F.J.; Martinez-Vazquez, J.;	<i>Decentralized Governance and Public Expenditure</i>	Desentralisasi meningkatkan porsi belanja sosial	1 5	Petrovito, F. (2023)	<i>Fiscal Decentralization and Income Redistribution within Regions</i>	Desentralisasi pendapatan (revenue decentralization) berpotensi memperlebar ketimpangan antarwilayah, sedangkan desentralisasi belanja dengan

			transfer berbasis kinerja menurunkan ketimpangan. Rekomendasi: desain ulang sistem transfer fiskal untuk efisiensi dan keadilan.
--	--	--	--

Pembahasan

Hasil penelitian dari berbagai studi memperlihatkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia memberikan dampak yang kompleks dan tidak seragam di antara daerah. Perbedaan kapasitas kelembagaan dan kemampuan manajerial pemerintah daerah menjadi faktor pembeda utama antara daerah yang sukses memanfaatkan otonomi fiskal dengan daerah yang justru menghadapi permasalahan tata kelola dan efisiensi anggaran.

Temuan Kis-Katos dan Sjahrir (2017) menunjukkan bahwa desentralisasi dapat mendorong peningkatan investasi publik, terutama pada daerah yang memiliki kapasitas kelembagaan tinggi. Daerah tersebut mampu memanfaatkan keleluasaan fiskal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan

layanan publik. Namun, hasil berbeda terlihat di daerah dengan kapasitas rendah, di mana dana transfer justru banyak terserap untuk belanja rutin tanpa kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya kualitas sumber daya manusia birokrasi dan kemampuan perencanaan fiskal sebagai penentu keberhasilan kebijakan desentralisasi.

Sementara itu, Pal dan Wahhaj (2017) menekankan pentingnya peran institusi lokal dalam mengoptimalkan kebijakan fiskal daerah. Daerah dengan struktur kelembagaan yang kuat cenderung memiliki tata kelola keuangan yang lebih baik, partisipasi masyarakat lebih tinggi, serta proses pengambilan keputusan yang transparan. Studi ini sejalan dengan Setiawan et al. (2022) yang menegaskan bahwa kapasitas teknis dan manajerial daerah berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan publik.

Dari sisi pemerataan fiskal, Akita et al. (2021) menemukan bahwa kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) berhasil menurunkan ketimpangan fiskal antarwilayah. Namun, masih terdapat disparitas besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

menyebabkan daerah kaya sumber daya tetap lebih dominan dibanding daerah yang miskin sumber daya. Temuan ini diperkuat oleh Pietrovito (2023) yang menyoroti bahwa desentralisasi fiskal berbasis kinerja berpotensi menekan ketimpangan, tetapi hanya jika terdapat mekanisme distribusi dana yang mempertimbangkan kebutuhan dan hasil pembangunan.

Dalam konteks tata kelola, desentralisasi membawa konsekuensi terhadap munculnya risiko korupsi baru. Alfada (2019) serta Changwony dan Paterson (2019) menemukan bahwa kelemahan pengawasan fiskal dan praktik akuntansi yang tidak standar membuka ruang korupsi di tingkat daerah. Silitonga et al. (2023) menambahkan bahwa pola korupsi pasca-desentralisasi tidak lagi bersifat individual, tetapi berbentuk jaringan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor pemerintahan dan non-pemerintah. Kondisi ini menuntut pendekatan pengawasan yang lebih sistematis, termasuk melalui digitalisasi pelaporan dan peningkatan transparansi publik.

Dari sisi belanja publik, Ghozali dan Khoirunurrofik (2020) mengungkapkan bahwa

desentralisasi mendorong peningkatan belanja modal, khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Namun, peningkatan tersebut sering disertai penurunan proporsi anggaran untuk sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini menimbulkan dilema pembangunan, di mana pembangunan fisik berjalan cepat tetapi peningkatan kualitas sumber daya manusia justru berjalan lambat. Hasil serupa dikemukakan oleh Arze del Granado et al. (2018) yang menemukan bahwa keberhasilan desentralisasi dalam memperluas belanja sosial hanya dapat tercapai bila pemerintah pusat tetap berperan sebagai pengawas dan penyeimbang kebijakan daerah.

Dalam konteks pembangunan manusia, Sahputri dan Siswidiyanto (2023) serta Siburian (2022) menunjukkan bahwa desentralisasi berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan kemiskinan, terutama di daerah yang memiliki kapasitas kelembagaan baik. Namun, di daerah yang masih bergantung sepenuhnya pada transfer pusat, efek desentralisasi terhadap pengurangan kemiskinan relatif kecil. Dengan kata

lain, desentralisasi baru akan menghasilkan kesejahteraan apabila pemerintah daerah mampu mengelola otonomi fiskal secara mandiri dan akuntabel.

Studi Lewis (2023) tentang implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) menegaskan bahwa kebijakan terbaru ini membawa semangat perbaikan koordinasi fiskal, tetapi sekaligus menuntut kesiapan daerah dalam mengelola sistem pelaporan dan akuntabilitas yang lebih kompleks. Tanpa kesiapan yang memadai, reformasi justru berisiko menimbulkan kebingungan dalam proses transisi dan pelaksanaan kebijakan fiskal di tingkat daerah.

Jika dikaitkan dengan teori desentralisasi klasik (Oates, 1972), temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa manfaat desentralisasi baru akan optimal bila fungsi-fungsi pemerintahan dilaksanakan oleh tingkatan pemerintahan yang paling mengetahui kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, efisiensi alokasi tidak otomatis terjadi tanpa kapasitas kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan

desentralisasi fiskal di Indonesia ditentukan oleh tiga pilar utama: kapasitas daerah, transparansi fiskal, dan keadilan distribusi antarwilayah. Kegagalan pada salah satu aspek tersebut dapat menyebabkan kebijakan desentralisasi kehilangan arah, menciptakan kesenjangan baru, dan memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah.

E. Kesimpulan

Kesimpulan

Desentralisasi fiskal merupakan instrumen penting dalam memperkuat otonomi daerah dan mendorong pembangunan yang lebih merata. Berdasarkan hasil kajian, kebijakan ini mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat apabila diiringi dengan kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang baik. Namun, pelaksanaan yang tidak merata dan lemahnya sistem pengawasan di beberapa daerah telah menimbulkan risiko ketidakefisienan dan penyimpangan fiskal. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh daerah memiliki kapasitas dan

dukungan yang memadai untuk mengelola dana secara efektif agar tujuan pemerataan dan kesejahteraan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, pemerintah pusat perlu memperkuat kapasitas teknis dan manajerial pemerintah daerah melalui berbagai program peningkatan kompetensi aparatur, pendampingan kebijakan fiskal, serta pembinaan akuntabilitas publik. Peningkatan kapasitas tidak hanya difokuskan pada aspek administrasi, tetapi juga pada kemampuan analisis kebijakan, perencanaan berbasis data, dan pengendalian kinerja.

Desain transfer fiskal antar pemerintah harus direformasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah dan berbasis pada capaian kinerja. Formula transfer yang mempertimbangkan ketimpangan fiskal dan kualitas layanan publik akan mendorong keadilan alokasi anggaran. Pemerintah daerah dengan capaian tinggi perlu diberikan insentif fiskal, sementara daerah dengan kinerja rendah memerlukan program pembinaan khusus.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas publik harus ditingkatkan melalui digitalisasi pelaporan keuangan dan penggunaan sistem informasi terintegrasi. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran juga penting untuk memastikan dana publik digunakan sesuai prioritas pembangunan. Terakhir, desentralisasi fiskal harus menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan investasi sumber daya manusia, karena keberhasilan pembangunan daerah pada akhirnya bergantung pada kualitas masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akita, T., Riadi, A. A., & Rizal, A. (2021). *Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era*. *Regional Science Policy & Practice*, 13(5), 1292–1310. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12326>
- Alfada, A. (2019). *Does fiscal decentralization encourage corruption in local governments?* *Journal of Risk and Financial Management*, 12(3), 118. <https://doi.org/10.3390/jrfm12030118>
- Arze del Granado, F. J., Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2018). *Decentralized governance and public*

- expenditure composition. *Public Finance Review*, 46(1), 3–35.
<https://doi.org/10.1177/1091142116639127>
- Changwony, F. K., & Paterson, A. S. (2019). *Accounting practice, fiscal decentralization and corruption*. *The British Accounting Review*, 51(5), 100836.
<https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.04.003>
- Ghozali, I., & Khoirunurrofik, K. (2020). *Fiscal decentralisation and capital expenditure composition of regional government in Indonesia*. *International Journal of Trade and Global Markets*, 13(1), 1–14.
<https://doi.org/10.1504/IJTG.2020.104909>
- Hofman, B., & Kaiser, K. (2004). The making of the Big Bang and its aftermath: A political economy perspective. *World Bank Policy Research Working Paper*.
<https://doi.org/10.4337/9781845421656.00007>
- Kis-Katos, K., & Sjahrir, B. S. (2017). *The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia*. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), 344–365.
<https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.003>
- Letelier-Saavedra, L. E. (2015). *Fiscal decentralization in specific areas of government: Empirical evaluation using country panel data*. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 33(6), 1511–1537.
<https://doi.org/10.1068/c1311111>
- Lewis, B. D. (2023). *Indonesia's new fiscal decentralisation law: Implications for intergovernmental relations*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 145–163.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Pal, S., & Wahhaj, Z. (2017). *Fiscal decentralisation, local institutions and public goods provision*. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), 383–409.
<https://doi.org/10.1016/j.jce.2016.07.004>
- Petrovito, F. (2023). *Fiscal decentralization and income redistribution within regions*. *Regional Studies*, 57(8), 1294–1308.
<https://doi.org/10.1016/j.struec.2023.07.002>
- Rondinelli, D. A. (1999). What is Decentralization? *World Bank Institute Working Paper*.
- Sahputri, R. A. M., & Siswidiyanto. (2023). *Decentralisation and human development in Indonesia: The importance of local government capacity*. *Lex Localis*, 21(2), 393–419.

- [https://doi.org/10.4335/21.2.393-419\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.2.393-419(2023))
Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). *The impact of local government capacity on public service delivery: Evidence from Indonesia*. *Economies*, 10(12), 323.
<https://doi.org/10.3390/economies10120323>
- Siburian, M. E. (2022). *Fiscal decentralization and poverty: Evidence from Indonesia*. *Journal of Asian Economics*, 81, 101493.
<https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101493>
- Silitonga, M. S., Wittek, R., Snijders, T. A. B., & Heyse, L. (2023). *Democratizing corruption: A role structure analysis of Indonesia's "Big-Bang" decentralization*. *Applied Network Science*, 8(1), 1–24.
<https://doi.org/10.1007/s41109-023-00535-w>
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. Allen & Unwin.
<https://doi.org/10.4324/9781003404927>
- Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development*, 35(2), 97–112.
<https://doi.org/10.1002/pad.1703>
- Yunan, Z. Y., Freyens, B., Vidyattama, Y., & Mohanty, I. (2023). *Spread of corruption in Indonesia after decentralisation: A spatiotemporal analysis*. *Oxford Development Studies*, 51(3), 289–308.
<https://doi.org/10.1080/13600818.2022.2162493>